



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian formasi jabatan fungsional serta adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. pengadaan pegawai;
 - b. penyusunan formasi pegawai;
 - c. rotasi pegawai;
 - d. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - e. pelaksanaan sistem kerja.
- KETIGA : Pengangkatan ke dalam jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, harus memenuhi syarat dan standar kompetensi jabatan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 139 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

- Paraf:
- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
 - 2. Plt. Kepala Biro Umum
 - 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum*
 - 4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Kelas = 17

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Rekrutmen Hakim	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	13	1	1	0
4.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20
5.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	8	25	-17
6.	Arsiparis Ahli Muda	9	3	3	0
7.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	30	32	-2
8.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
10.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
11.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Biro Investigasi

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Investigasi	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak	13	1	1	0
4.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	1	6	-5
5.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	16	-7
6.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	30	30	0
7.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
8.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
9.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim	15	1	1	0
2.	Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
3.	Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat	13	1	1	0
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan	13	1	1	0
5.	Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim	13	1	1	0
6.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	17	-17
7.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	12	19	-7
8.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
9.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
10.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	68	73	-5
11.	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
12.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	1	1	0
13.	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
14.	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Kepatuhan Internal	13	1	1	0
4.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
5.	Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
7.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	8	-8
8.	Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1
9.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
10.	Perencana Ahli Muda	10	2	7	-5
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	-1
12.	Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi	10	1	1	0
13.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	-3
14.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	2	-2
15.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	-9
16.	Auditor Ahli Muda	9	3	3	0
17.	Arsiparis Muda	9	0	0	0
18.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
19.	Auditor Ahli Pertama	8	2	4	-2
20.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	5	11	-6
21.	Perencana Ahli Pertama	8	2	8	-6
22.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama	8	1	4	-3
23.	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
25.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
26.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
27.	Penata Kelola Pemerintahan	7	5	5	0

Kepala Biro Umum

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Umum	15	0	1	-1
2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Keuangan	13	1	1	0
4.	Kepala Bagian Perencanaan dan Rumah Tangga	13	1	1	0
5.	Kepala Bagian Penghubung Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	13	1	1	0
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1	4	-3
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12	2	3	-1
8.	Dokter Ahli Madya	12	1	1	0
9.	Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	1	0
10.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
11.	Arsiparis Ahli Madya	11	1	2	-1
12.	Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12	0	1	-1
13.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10	1	8	-7
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
15.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	5	-3
16.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
17.	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
18.	Dokter Gigi Ahli Muda	10	0	1	-1
19.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10	0	2	-2
20.	Kepala Subbagian Protokol	10	1	1	0
21.	Kepala Subbagian Perlengkapan	10	1	1	0
22.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10	1	1	0
23.	Kepala Subbagian Administrasi Penghubung	10	1	1	0
24.	Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	9	1	1	0
25.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
26.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9	1	1	0
27.	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi	15	1	1	0
2.	Kepala Bidang Analisis dan Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	13	1	1	0
3.	Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi	13	1	1	0
4.	Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
5.	Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
6.	Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
7.	Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
8.	Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
9.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
10.	Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	3	-2
12.	Kepala Subbidang Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	10	1	1	0
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	10	0	2	-2
14.	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
15.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
16.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	6	6	0
17.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
18.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
19.	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
20.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	5	5	0
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	7	-4
22.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	7	8	-1
23.	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	1	3	-2
24.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	4	4	0
25.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0
26.	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
27.	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

Kepala Biro Perencanaan dan Ketaatan Internal
Kelas = 15

28.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
29.	Auditor Terampil	6	1	2	-1
30.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Biro Umum
Kelas = 15

28.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	2	2	0
29.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	5	5	0
30.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	3	5	-2
31.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8	0	3	-3
32.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
33.	Arsiparis Ahli Pertama	8	6	6	0
34.	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
35.	Dokter Ahli Pertama	8	0	1	-1
36.	Dokter Gigi Ahli Pertama	8	0	1	-1
37.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	0	2	-2
38.	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
39.	Perawat Penyelia	8	1	1	0
40.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	0	0
41.	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
42.	Perawat Mahir	7	0	1	-1
43.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
44.	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
45.	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
46.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7	1	2	-1
47.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	7	9	-2
48.	Penata Keprotokolan	7	10	10	0
49.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	1	1	0
50.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
51.	Penata Kelola Pemerintahan	7	18	19	-1
52.	Teknis Sarana dan Prasarana	7	2	2	0
53.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	3	2	1
54.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	4	0
55.	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
56.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	1	0
57.	Arsiparis Terampil	6	1	6	-5
58.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
59.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
60.	Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2	-1

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kelas = 15

28.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
29.	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
30.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	7	0	1	-1
31.	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
32.	Arsiparis Mahir	7	1	1	0
33.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
34.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
35.	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
36.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
37.	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
38.	Pranata Komputer Terampil	6	2	5	-3
39.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
40.	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20

Kepala Bagian Rekrutmen Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	2	12	-10
2.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	13	15	-2
4.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
5.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
6.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	6	13	-7
2.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	17	17	0
4.	Penelaah Advokasi Hakim	7	2	2	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	41	83	-42
Jabatan Pelaksana	2	2	0
Total	46	88	-42

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim					
Kelas = 15					

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	17	-17

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	3	3	0
Jabatan Fungsional	82	121	-39
Jabatan Pelaksana	1	1	0
Total	87	126	-39

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	0	4	-4
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	25	25	0
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
5.	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
6.	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
7.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	1	1	0
8.	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	9	0
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	32	32	0

Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim					
Kelas = 13					

No	Jabatan Fungsional	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	3	6	-3
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	11	16	-5

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Kepala Biro Investigasi
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	1	6	-5

Kepala Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi
Kelas = 13

No	Jabatan Fungsional	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	4	8	-4
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	15	15	0
3.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
4.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
5.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	5	8	-3
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	15	15	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	40	54	-14
Total	43	57	-14

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Madya Madya	11	0	8	-8
Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	20	82	-62
Jabatan Pelaksana	9	9	0
Total	33	95	-62

Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Perencana Ahli Muda	10	2	7	-5
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	-1
3.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	-3
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	2	-2
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	-9
6.	Arsiparis Muda	9	0	0	0
7.	Perencana Ahli Pertama	8	2	8	-6
8.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
9.	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
10.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
11.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
12.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0
13.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
14.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Bagian Kepatuhan Internal
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Auditor Ahli Muda	9	3	3	0
2.	Auditor Ahli Pertama	8	2	4	-2
3.	Auditor Terampil	6	1	2	-1

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	5	11	-6
2.	Perancang Peraturan Perundang	8	1	4	-3
3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Kepala Biro Umum
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1	4	-3
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12	2	3	-1
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12	0	1	-1
Dokter Ahli Madya	12	1	1	0
Arsiparis Ahli Madya	11	1	2	-1
Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	1	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
JPT Pratama	0	1	-1
Jabatan Administrator	4	4	0
Jabatan Pengawas	5	5	0
Jabatan Fungsional	37	100	-63
Jabatan Pelaksana	45	50	-5
Total	91	160	-69

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	5	-3
2.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
4.	Arsiparis Ahli Pertama	8	5	5	0
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	2	2	0
7.	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
8.	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
10.	Penata Kelola Pemerintahan	7	8	9	-1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
12.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	1	0
13.	Arsiparis Terampil	6	1	6	-5
14.	Pengadministrasian Perkantoran	5	1	2	-1

Kepala Subbagian Protokol
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Keprotokolan	7	10	10	0

Kepala Bagian Keuangan
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10	1	8	-7
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	3	5	-2
3.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9	1	1	0
4.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8	0	3	-3
5.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7	1	2	-1
6.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0
7.	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
3.	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
6.	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
7.	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
8.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	1	1	0
9.	Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Kepala Subbagian Rumah Tangga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Dokter Ahli Pertama	9	0	1	-1
2.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	0	1	-1
3.	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
4.	Perawat Penyelia	8	1	1	0
5.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	0	0
6.	Perawat Mahir	7	0	1	-1
7.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
9.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0
10.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	1	1	0
11.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	1	1	0
12.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
13.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	0	1	-1
14.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	2	2	0
15.	Pengadministrasian Perkantoran	6	0	0	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
2.	Dokter Gigi Ahli Muda	10	0	1	-1
3.	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Administrasi Penghubung
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	2	2	0
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
4.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	0	2	-2
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
3.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10	0	2	-2

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	41	91	-50
Jabatan Pelaksana	5	5	0
Total	50	100	-50

Kepala Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	3	-2
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	7	8	-1
5.	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
7.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
8.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0

Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
2.	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
4.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	6	6	0
5.	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
6.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	5	5	0
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	7	-4
8.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	4	4	0
9.	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	1	3	-2
10.	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
11.	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
12.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
13.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
14.	Arsiparis Mahir	7	1	0	1
15.	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
16.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
17.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
18.	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
19.	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
20.	Pranata Komputer Terampil	6	2	5	-3
21.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
22.	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

SEKRETARIS JENDERAL,



MARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian formasi jabatan fungsional serta adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. pengadaan pegawai;
 - b. penyusunan formasi pegawai;
 - c. rotasi pegawai;
 - d. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - e. pelaksanaan sistem kerja.
- KETIGA : Pengangkatan ke dalam jabatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, harus memenuhi syarat dan standar kompetensi jabatan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 139 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Kelas = 17

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Rekrutmen Hakim	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	13	1	1	0
4.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20
5.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	8	25	-17
6.	Arsiparis Ahli Muda	9	3	3	0
7.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	30	32	-2
8.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
10.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
11.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Biro Investigasi

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Investigasi	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak	13	1	1	0
4.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	1	6	-5
5.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	16	-7
6.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	30	30	0
7.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
8.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
9.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim	15	1	1	0
2.	Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
3.	Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat	13	1	1	0
4.	Kepala Bagian Pendidikan dan Pemeriksaan	13	1	1	0
5.	Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim	13	1	1	0
6.	Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	17	-17
7.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	12	19	-7
8.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
9.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
10.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	68	73	-5
11.	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
12.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	1	1	0
13.	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
14.	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	15	1	1	0
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Kepatuhan Internal	13	1	1	0
4.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
5.	Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
7.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	8	-8
8.	Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1
9.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
10.	Perencana Ahli Muda	10	2	7	-5
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	-1
12.	Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi	10	1	1	0
13.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	-3
14.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	2	-2
15.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	-9
16.	Auditor Ahli Muda	9	3	3	0
17.	Arsiparis Muda	9	0	0	0
18.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
19.	Auditor Ahli Pertama	8	2	4	-2
20.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	5	11	-6
21.	Perencana Ahli Pertama	8	2	8	-6
22.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama	8	1	4	-3
23.	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
25.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
26.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
27.	Penata Kelola Pemerintahan	7	5	5	0

Kepala Biro Umum

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Biro Umum	15	0	1	-1
2.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	13	1	1	0
3.	Kepala Bagian Keuangan	13	1	1	0
4.	Kepala Bagian Perencanaan dan Rumah Tangga	13	1	1	0
5.	Kepala Bagian Penghubung Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	13	1	1	0
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1	4	-3
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12	2	3	-1
8.	Dokter Ahli Madya	12	1	1	0
9.	Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	1	0
10.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
11.	Arsiparis Ahli Madya	11	1	2	-1
12.	Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12	0	1	-1
13.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10	1	8	-7
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
15.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	5	-3
16.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
17.	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
18.	Dokter Gigi Ahli Muda	10	0	1	-1
19.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10	0	2	-2
20.	Kepala Subbagian Protokol	10	1	1	0
21.	Kepala Subbagian Perlengkapan	10	1	1	0
22.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10	1	1	0
23.	Kepala Subbagian Administrasi Penghubung	10	1	1	0
24.	Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	9	1	1	0
25.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
26.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9	1	1	0
27.	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Kelas = 15

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi	15	1	1	0
2.	Kepala Bidang Analisis dan Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	13	1	1	0
3.	Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi	13	1	1	0
4.	Menggalang Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
5.	Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
6.	Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
7.	Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
8.	Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
9.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
10.	Menggalang Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	3	-2
12.	Kepala Subbidang Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	10	1	1	0
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	10	0	2	-2
14.	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
15.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
16.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	6	6	0
17.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
18.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
19.	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
20.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	5	5	0
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	7	-4
22.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	7	8	-1
23.	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	1	3	-2
24.	Menggalang Informatika Ahli Pertama	8	4	4	0
25.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0
26.	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
27.	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

Kepala Biro Perencanaan dan Ketaatan Internal
Kelas = 15

28.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
29.	Auditor Terampil	6	1	2	-1
30.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Biro Umum
Kelas = 15

28.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	2	2	0
29.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	5	5	0
30.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	3	5	-2
31.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8	0	3	-3
32.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
33.	Arsiparis Ahli Pertama	8	6	6	0
34.	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
35.	Dokter Ahli Pertama	8	0	1	-1
36.	Dokter Gigi Ahli Pertama	8	0	1	-1
37.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	0	2	-2
38.	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
39.	Perawat Penyelia	8	1	1	0
40.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	0	0
41.	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
42.	Perawat Mahir	7	0	1	-1
43.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
44.	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
45.	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
46.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7	1	2	-1
47.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	7	9	-2
48.	Penata Keprotokolan	7	10	10	0
49.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	1	1	0
50.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
51.	Penata Kelola Pemerintahan	7	18	19	-1
52.	Teknis Sarana dan Prasarana	7	2	2	0
53.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	3	2	1
54.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	4	0
55.	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
56.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	1	0
57.	Arsiparis Terampil	6	1	6	-5
58.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
59.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
60.	Pengadministrasi Perkantoran	6	1	2	-1

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kelas = 15

28.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
29.	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
30.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	7	0	1	-1
31.	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
32.	Arsiparis Mahir	7	1	1	0
33.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
34.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
35.	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
36.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
37.	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
38.	Pranata Komputer Terampil	6	2	5	-3
39.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
40.	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	20	-20

Kepala Bagian Rekrutmen Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	2	12	-10
2.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	13	15	-2
4.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
5.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
6.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	6	13	-7
2.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	17	17	0
4.	Penelaah Advokasi Hakim	7	2	2	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	41	83	-42
Jabatan Pelaksana	2	2	0
Total	46	88	-42

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim					
Kelas = 15					

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Penata Kehakiman Ahli Utama	13	0	2	-2
Penata Kehakiman Ahli Madya	12	0	17	-17

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	3	3	0
Jabatan Fungsional	82	121	-39
Jabatan Pelaksana	1	1	0
Total	87	126	-39

Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	0	4	-4
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	25	25	0
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
5.	Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
6.	Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
7.	Penelaah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7	1	1	0
8.	Arsiparis Terampil	6	0	4	-4

Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan					
Kelas = 13					

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	9	9	0
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	32	32	0

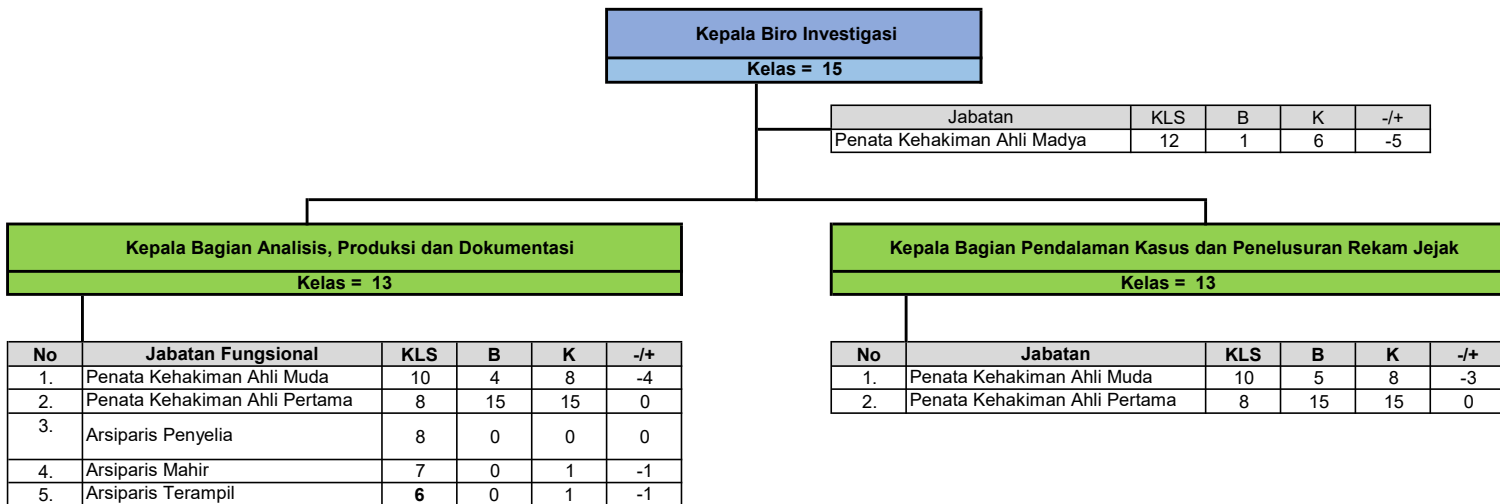
Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim					
Kelas = 13					

No	Jabatan Fungsional	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Kehakiman Ahli Muda	10	3	6	-3
2.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	8	11	16	-5

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Fungsional	40	54	-14
Total	43	57	-14

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE



Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	4	-4
Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Madya Madya	11	0	8	-8
Auditor Ahli Madya	11	0	1	-1

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	20	82	-62
Jabatan Pelaksana	9	9	0
Total	33	95	-62

Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Perencana Ahli Muda	10	2	7	-5
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	2	-1
3.	Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda	10	0	3	-3
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	0	2	-2
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	10	-9
6.	Arsiparis Muda	9	0	0	0
7.	Perencana Ahli Pertama	8	2	8	-6
8.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
9.	Arsiparis Pertama	8	1	1	0
10.	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0
11.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
12.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0
13.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
14.	Arsiparis Terampil	6	0	2	-2

Kepala Bagian Kepatuhan Internal
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Auditor Ahli Muda	9	3	3	0
2.	Auditor Ahli Pertama	8	2	4	-2
3.	Auditor Terampil	6	1	2	-1

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	5	11	-6
2.	Perancang Peraturan Perundang	8	1	4	-3
3.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



Kepala Biro Umum
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	1	4	-3
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	12	2	3	-1
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12	0	1	-1
Dokter Ahli Madya	12	1	1	0
Arsiparis Ahli Madya	11	1	2	-1
Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	1	0

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	-/+
JPT Pratama	0	1	-1
Jabatan Administrator	4	4	0
Jabatan Pengawas	5	5	0
Jabatan Fungsional	37	100	-63
Jabatan Pelaksana	45	50	-5
Total	91	160	-69

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	5	-3
2.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	1	2	-1
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	2	2	0
4.	Arsiparis Ahli Pertama	8	5	5	0
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	2	2	0
7.	Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
8.	Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
10.	Penata Kelola Pemerintahan	7	8	9	-1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
12.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	1	0
13.	Arsiparis Terampil	6	1	6	-5
14.	Pengadministrasian Perkantoran	5	1	2	-1

Kepala Subbagian Protokol
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Penata Keprotokolan	7	10	10	0

Kepala Bagian Keuangan
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10	1	8	-7
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8	3	5	-2
3.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9	1	1	0
4.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8	0	3	-3
5.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7	1	2	-1
6.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0
7.	Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	0	1	-1
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4	4	0
3.	Penata Laksana Barang Penyelia	8	0	3	-3
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
5.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
6.	Penata Laksana Barang Mahir	7	0	3	-3
7.	Penata Laksana Barang Terampil	6	0	6	-6
8.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	1	1	0
9.	Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Kepala Subbagian Rumah Tangga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Dokter Ahli Pertama	9	0	1	-1
2.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	0	1	-1
3.	Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
4.	Perawat Penyelia	8	1	1	0
5.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	0	0
6.	Perawat Mahir	7	0	1	-1
7.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
9.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0
10.	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	1	1	0
11.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	1	1	0
12.	Perawat Terampil	6	0	1	-1
13.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	0	1	-1
14.	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	6	2	2	0
15.	Pengadministrasian Perkantoran	6	0	0	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
2.	Dokter Gigi Ahli Muda	10	0	1	-1
3.	Apoteker Ahli Muda	8	0	1	-1

Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 13

Kepala Subbagian Administrasi Penghubung
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	1	0
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	2	2	0
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
4.	Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	0	2	-2
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
3.	Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10	0	2	-2

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kelas = 15

Jabatan	KLS	B	K	-/+
Analisis Hukum Ahli Madya	12	0	2	-2
Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	12	0	4	-4
Penerjemah Ahli Madya (Bahasa Inggris)	12	0	2	-2
Pustakawan Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	2	-2

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
JPT Pratama	1	1	0
Jabatan Administrator	2	2	0
Jabatan Pengawas	1	1	0
Jabatan Fungsional	41	91	-50
Jabatan Pelaksana	5	5	0
Total	50	100	-50

Kepala Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	3	-2
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	2	3	-1
3.	Arsiparis Ahli Muda	9	1	1	0
4.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	7	8	-1
5.	Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
6.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
7.	Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
8.	Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kelas = 10

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3	3	0

Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi
Kelas = 13

No	Jabatan	KLS	B	K	-/+
1.	Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	3	-3
2.	Penerjemah Ahli Muda (Bahasa Inggris)	9	2	3	-1
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
4.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	6	6	0
5.	Pustakawan Ahli Muda	9	0	1	-1
6.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	5	5	0
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	7	-4
8.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8	4	4	0
9.	Penerjemah Ahli Pertama (Bahasa Inggris)	8	1	3	-2
10.	Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
11.	Pustakawan Ahli Pertama	8	0	2	-2
12.	Asisten Perpustakaan Penyelia	8	0	1	-1
13.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
14.	Arsiparis Mahir	7	1	0	1
15.	Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
16.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	2	-1
17.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
18.	Asisten Perpustakaan Mahir	7	0	2	-2
19.	Asisten Perpustakaan Terampil	6	0	2	-2
20.	Pranata Komputer Terampil	6	2	5	-3
21.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
22.	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E

